



Pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta Bali

Dermawan Waruwu ^{a,1*}, Ni Ketut Jeni Adhi ^{b,2}

^{a, b} Program Studi Psikologi, Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

¹ dermawanwaruwu@undhirabali.ac.id *; ² aketutjeni@undhirabali.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 14-11-2018 Revisi : 17-01-2019 Dipublikasikan : 31-03-2019	<p>Penelitian ini mengkaji tentang jenis penyandang disabilitas dan bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Masalah ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kajian budaya serta dikaji menggunakan teori hegemoni dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan: (1) jenis penyandang disabilitas yang diberdayakan pada objek wisata Kuta yaitu tunanetra dan tunadaksa; (2) bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu <i>cleaning service</i>, tukang masak, operator CCTV, dan penjual pulsa keliling; (3) penyandang disabilitas kurang diberdayakan pada objek wisata Kuta, sehingga mereka menjadi kelompok yang termarginalkan dan terhegemoni ditengah geliat industri pariwisata. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat diharapkan agar memberdayakan penyandang disabilitas secara maksimal agar mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk keberlanjutan kehidupannya.</p>
<p>Kata kunci: Disabilitas Bali Pemberdayaan</p>	
<p>Keywords: <i>Disabilities</i> <i>Bali</i> <i>Empowerment</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This study examines what types of people with disabilities and how to empower people with disabilities in the tourist attraction of Kuta, Badung Regency, Bali Province? This problem is analyzed qualitatively with a cultural study approach and examined using the theory of hegemony and social practice. The results of the study showed: (1) types of persons with disabilities who were empowered in Kuta's tourist objects, namely blind and disabled people; (2) forms of empowerment namely cleaning service, cooks, CCTV operators, and mobile credit sellers; (3) people with disabilities are less empowered in Kuta tourism objects, so they become the marginal group and hegemony in the midst of the stretch of the tourism industry. The government, employers, and the community are expected to empower persons with disabilities to the fullest so that they get decent jobs for the sustainability of their.</i></p>

Copyright © 2019 Dermawan Wawuru dan Ni Ketut Jeni Adhi. All Right Reserved

Pendahuluan

Keberadaan penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak bisa bekerja, dan menyusahkan orang lain. Penilaian negatif ini mengakibatkan sebagian penyandang disabilitas mengurung diri di rumah, tertekan secara psikologis, kurang bersosialisasi, dan tidak mau mengembangkan potensi dirinya. Padahal penyandang disabilitas memiliki kemampuan sama dengan orang yang sehat secara fisik jika mereka diberdayakan secara maksimal.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Badung tahun 2011 berdasarkan

data dari Badan Pusat Statistik diketahui sebanyak 1.704 orang. Namun demikian terjadi peningkatan penyandang disabilitas pada tahun 2015 menjadi 2.114 orang (Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2017). Berdasarkan data di atas menegaskan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak dalam mencapai tujuan pembangunan pada era globalisasi (Halimah & Anisah, 2018). Penyandang disabilitas merupakan sumber daya manusia yang perlu diberdayakan pada semua sektor jasa. Salah

satu contoh keberhasilan yang diraih oleh penyandang disabilitas asal Bali bernama Ni Nengah Widiasih yang mendapat medali perunggu setelah sukses mengangkat beban 95 kg di Paralympic Games 2016 di Rio de Janeiro, Brasil (Kompas, 2016)

Pemberdayaan disabilitas dapat dilihat dari perspektif sosial berakar dari sudut pandang mengenai perlunya kemandirian pada penentuan nasib sendiri, menentukan pilihan dan pandangan warga negara disabilitas untuk mendorong peniadaan “penindasan sosial “ disabilitas (Barnes & Mercer, 2010; French & Swain, 2012). Pandangan demikian didasari dari terminologi disabilitas sebagai hambatan dari berbagai konteks untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat (Iudici, Favaretto, & Turchi, 2019)

Dalam konteks Indonesia, hak setiap warga Negara dan secara khusus penyandang disabilitas sebenarnya tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Implementasi UUD 1945 ternyata tidak dilaksanakan secara adil dalam Perda tersebut. Dalam Pasal 27 ditegaskan bahwa gubernur hanya memfasilitasi penggunaan tenaga kerja pada perusahaan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan setiap 100 orang pekerja yang sehat secara fisik. Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2015 kurang berpihak kepada penyandang disabilitas di Bali. Pemerintah maupun pengusaha menghegemoni penyandang disabilitas melalui regulasi tersebut. Perda ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga swasta kurang memberdayakan setiap penyandang disabilitas di kawasan wisata Kuta Bali.

Daerah Kuta merupakan salah satu objek wisata bertaraf nasional dan internasional

dengan sarana hotel berbintang. Dengan PAD yang cukup besar serta lapangan kerja yang banyak seharusnya pemerintah dan pengusaha dapat memberdayakan penyandang disabilitas yang potensial di daerah ini. Dalam konteks inilah, setiap penyandang disabilitas termarginalkan oleh stigma sebagai kaum lemah serta terhegemoni dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Implementasi Perda di atas ternyata kurang berpihak terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Badung. Fakta menunjukkan bahwa perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta di kawasan wisata Kuta justru menerapkan persyaratan yang sama terhadap tenaga kerja disabilitas seperti orang normal. Akibatnya banyak penyandang disabilitas yang tidak memperoleh pekerjaan sekalipun perusahaan (hotel) memiliki karyawan lebih dari 100 orang. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, maka penyandang disabilitas sebagian menjadi pengemis dan pekerja serabutan di kawasan wisata Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji mengenai jenis penyandang disabilitas yang diberdayakan pada objek wisata Kuta dan bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta, Badung, Bali.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian budaya serta dikaji menggunakan teori hegemoni dan praktik sosial. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010). Pendekatan kajian budaya sebagai strategi keberpihakan terhadap penyandang disabilitas yang kurang diberdayakan oleh pemerintah dan pengusaha di kawasan wisata Kuta, Badung, Bali (Barker, 2014). Dalam konteks ini, fenomena budaya atau sosial merupakan strategi pengumpulan data seperti *life history*, pengalaman pribadi, wawancara, pengamatan, sejarah teks, dan sebagainya (Singarimbun & Effendi, 1989; Suwardi, 2006). Data diperoleh

melalui pengamatan, wawancara, dokumen, dan proses pemahaman lainnya (Kerlinger, 2006). Peneliti mengobservasi secara langsung keberadaan serta kondisi penyandang disabilitas yang bekerja di beberapa hotel atau perusahaan di kawasan wisata Kuta. Peneliti kemudian mewawancarai penyandang disabilitas, karyawan hotel, dan masyarakat. Dokumen foto, kebijakan, dan peraturan terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas dikumpulkan serta dianalisis sehingga menjadi suatu deskripsi yang lengkap. Semua data dicatat dan dideskripsikan sehingga pembaca mudah memahami secara menyeluruh tentang kondisi penyandang disabilitas di kawasan wisata Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Hasil dan Pembahasan

Disabilitas merupakan hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan komunikasi) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat (Adioetomo, Daniel Mont, & Irwanto, 2016). Sehingga demikian penyandang disabilitas terhambat terhadap akses-akses yang ada tanpa alat bantu. Penyandang disabilitas telah lama mengalami marginalisasi ekonomi dan politi serta sangat dirugikan dan dikucilkan di bidang kesejahteraan dengan tingkat partisipasi pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan atau tingkat kemiskinan (Adioetomo et al., 2016).

Berdasarkan definisi di atas, maka jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Bali tahun 2011 sebanyak 18.861 orang yang terdiri dari 2.343 orang penderita tuna netra, 3.694 orang penderita tuna wicara, 7.648 orang penderita cacat anggota badan, dan sebanyak 8.266 orang cacat mental (BPS Kabupaten Badung, 2015). Kabupaten Badung pada tahun 2011 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1.704 orang (Putra & Adhi, 2014) serta tahun 2015 berjumlah 2.114 orang (Badungkab, 2015). Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Badung diketahui bahwa penyandang disabilitas tahun 2017 berjumlah 2.862 orang yang tersebar pada 6 kecamatan se-Kabupaten Badung (Dinas Sosial

Kabupaten Badung, 2017). Penyandang disabilitas tuna daksa (cacat tubuh) 1.348 orang, cacat mental 705 orang, tuna netra 270 orang, tuna ganda 113 orang, tuna rungu/wicara 393 orang, dan disabilitas penyakit kronis 33 orang (Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2017).

Penelitian ini menghasilkan dua hal yaitu jenis penyandang disabilitas yang sudah diberdayakan pada objek wisata Kuta dan bentuk pemberdayaan disabilitas pada objek wisata Kuta. Jenis penyandang disabilitas yang sudah diberdayakan pada objek wisata Kuta yaitu tunanetra (buta) dan tunadaksa (cacat fisik). Tunanetra merupakan keadaan seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatan sejak lahir maupun setelah dewasa. Pengukuran ketajaman penglihatan dilakukan dengan mempergunakan *international chart* yang disebut *Eyesight-Test*, sehingga *Legally blind* diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu *blind* (buta total) dan *low vision* (Hallahan & Kauffman, 2006). Penyandang disabilitas tunanetra biasanya mengandalkan fungsi inderanya seperti perabaan, penciuman, dan pendengaran agar bisa berinteraksi dengan lingkungannya.

Salah satu penyandang disabilitas tunanetra sebagian yang diberdayakan di kawasan wisata Kuta yaitu Ibu Salama yang mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya yang disebabkan oleh bedak bayi yang dioleskan oleh orang tuanya waktu kecil. Pada saat ini, ibu Salama bekerja sebagai tenaga serabutan di restoran Batam 88 *Food Court* Udayana Kuta, seperti memasak air, memasak nasi, dan cuci piring. Penderitaan ibu Salama ini ditemukan pada saat penulis mendatangi tempatnya bekerja. Ada keinginan yang besar dari Salama untuk mendapatkan kesembuhan dari kebutaan tersebut, sehingga bisa melihat dan beraktivitas seperti orang pada umumnya. Perhatian pemerintah terhadap Ibu Salama saat mengalami musibah ini kurang maksimal. Jika mata ibu ini dioperasi secara cepat pada saat kejadian, ada kemungkinan tidak mengalami kebutaan tersebut. Kondisi ibu Salama yang mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Ibu Salama di Restoran Batam Kuta
(Dokumen: Dermawan Waruwu, 2018)

Penderitaan yang dialami oleh penyandang disabilitas di atas berlanjut ketika bekerja di restoran Batam 88 Kuta. Dia pernah mengalami kecelakaan tersiram air panas pada saat menjalankan tugasnya di restoran tersebut. Kakinya terbakar sehingga tidak bisa bekerja selama 1 bulan. Semua biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Perhatian pemilik restoran terhadap penyandang disabilitas masih sangat kurang. Terbukti ketika Ibu Salama mengalami musibah tersiram air panas pada saat sedang bekerja, justru biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh penyandang disabilitas tersebut. Kekuatan penyandang disabilitas terbatas untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh biaya kesembuhan. Pemilik perusahaan memiliki ruang dan kekuatan untuk menekan upah pekerja yang berada di bawah kekuasaannya (Barker, 2005). Akibat kekuasaan pemilik perusahaan, maka biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh ibu Salama serta tidak mendapatkan gaji selama proses kesembuhannya.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama hidupnya serta terus berjuang untuk mendapatkan haknya seperti orang normal pada umumnya (Budiana, 2017). Dalam kondisi ini, Ibu Salama tidak bisa menuntut upah dan biaya pengobatan dari pemilik restoran. Cara satu-satunya yang harus dilakukan adalah dia terus

berjuang untuk sembuh agar bisa kembali bekerja di restoran tersebut. Mereka terpaksa bekerja dengan keterbatasan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Kejadian yang dialami oleh ibu Salama tidak jauh berbeda dengan nasib teman-temannya penyandang disabilitas di kawasan wisata Kuta. Kondisi penyandang disabilitas tunadaksa (cacat fisik) tidak jauh berbeda dengan tunanetra. Tuna daksa merupakan sebagai bentuk kelainan pada bagian luar tubuh yang vital baik bawaan maupun bukan bawaan yang mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan pribadi (Pratiwi & Hartosujono, 2018). Penyandang disabilitas seperti ini mengalami gangguan atau kekurangan anggota tubuhnya seperti tangan, kaki, jari, dan sebagainya.

Penyandang disabilitas tunadaksa yang sudah bekerja di kawasan wisata Kuta bernama Anto, Wayan Nuartha, dan Nur. Anto mengalami kecacatan pada bibirnya (bibir sumbing). Anto sudah bekerja di *Food Court* Udayana selama 5 tahun sebagai *cleaning service*. Ada kesenangan yang didapatkan oleh Anto karena bisa diterima bekerja di *Food Court* Udayana, karena sebelumnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan di kawasan wisata Kuta. Kondisi Pak Anto pada saat diwawancarai sebagaimana terlihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Anto di *Food Court* Udayana, Kuta
(Dokumen: Dermawan Waruwu, 2018)

Anto sangat bersyukur diterima bekerja sebagai *cleaning service* di *Food Court* Udayana Kuta tersebut. Anto kurang percaya diri atas kondisinya fisiknya. Pada awalnya, Anto tidak mau diwawancarai karena merasa malu karena menderita bibir sumbing. Kepercayaan diri harus ditanamkan pada setiap penyandang disabilitas seperti Anto ini, sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungannya dan bekerja dengan maksimal. Oleh sebab itu, setiap penyandang disabilitas diberikan pengetahuan tentang kepercayaan diri serta keterampilan kerja sesuai potensi dirinya (Fatmawati, *et.al.*, 2018).

Penyandang disabilitas kurang mendapat kesempatan untuk bekerja di kawasan wisata Kuta. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penyandang disabilitas yang ingin bekerja di sektor pariwisata yang terkenal selama ini. Hal ini dikatakan oleh Virginie Tutin Sandstrom asal Perancis yang bekerja sebagai *General Manager* di Harris Riverview Kuta bahwa “Tidak semua disabilitas diterima bekerja di hotel”. Sistem perekrutan karyawan penyandang disabilitas hampir sama dengan orang normal.

Penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di hotel maupun tempat kerja lainnya di kawasan wisata Kuta selama ini. Orang yang memiliki keterbatasan fisik menjadi kelompok termarginalkan di tengah geliat industri pariwisata maupun kelimpahan dolar. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menunjang kehidupannya. Orang miskin atau kelompok yang terpinggirkan tidak bisa bicara ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kebijakan pemilik modal atau kebijakan perusahaan (Barker, 2005). Padahal penyandang disabilitas dapat diberdayakan pada bidang pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan tenaga fisik seperti operator CCTV, operator telepon, dan sebagainya.

Salah seorang penyandang disabilitas bernama Wayan Nuartha yang menderita cacat fisik pada kedua kakinya bekerja sebagai operator CCTV di Hotel Nusa Dua Beach Kuta Selatan. Penyandang disabilitas ini mengandalkan kursi roda dan sepeda motor yang didesain sendiri agar bisa bekerja di hotel tersebut. Nuartha sangat senang bisa

bekerja sebagai operator CCTV di hotel Nusa Dua Beach kendati awalnya berusaha sendiri mendesain kendaraannya agar bisa beraktivitas atau bekerja di hotel tersebut. Kondisi Wayan Nuartha sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Nuartha Menggunakan Kursi Roda (Dokumen: Dermawan Waruwu & Jeni, 2018)

Penyandang disabilitas dapat diberdayakan sebagaimana orang yang sehat secara fisik. Wayan Nuartha mampu mengoperasikan komputer karena telah dilatih sebelumnya di lembaga pendidikan yang konsen terhadap penyandang disabilitas yaitu Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jimbaran Bali. Pendidikan merupakan salah satu syarat pengembangan sumber daya manusia (Halimah & Anisah, 2018). Dengan adanya pendidikan dan keterampilan mengoperasikan komputer dapat membantu setiap penyandang disabilitas. Pekerjaan sebagai operator sangat membantu Nuartha untuk membiayai hidup, keluarganya, dan bahkan membantu Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jimbaran Bali tempatnya diasuh.

Kehidupan Mas Nur berbeda dengan Anto dan Nuartha. Mas Nur mengalami cacat pada kakinya sehingga menggunakan tongkat untuk beraktivitas. Keseharian Mas Nur dihabiskan di pantai Kuta dengan menjual pulsa keliling sambil mengharap belas kasihan masyarakat yang ada di pantai

tersebut. Kondisi Mas Nur saat menjual pulsa di pantai Kuta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Mas Nur Menjual Pulsa di Kuta
(Dokumen: Dermawan Waruwu, 2018)

Pekerjaan Mas Nur sebagai penjual pulsa keliling di pantai Kuta terpaksa dilakukan untuk mencari biaya hidupnya sehari-hari. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan (Budiana, 2017). Pekerjaan ini sudah dilakukan Mas Nur selama 10 tahun. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki Nur ternyata memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Dengan adanya keterampilan berbahasa Inggris ini sebenarnya penyandang disabilitas ini bisa diberdayakan di hotel atau restoran sebagai operator telepon di kawasan wisata Kuta.

Pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta dalam 4 (empat) bentuk: *pertama*, tukang masak air dan nasi. Penyandang disabilitas yang tunanetra (buta sebelah) bernama Ibu Salama bekerja di restoran Batam Kuta. Pekerjaan Ibu Salama bertugas memasak air, nasi, dan mencuci piring. Dia terpaksa melakukan pekerjaan ini untuk membantu suaminya yang bekerja serta mencari biaya sekolah anaknya.

Kedua, *cleaning service*. Anto yang memiliki kecacatan fisik berupa bibir sumbing diberdayakan sebagai *cleaning service* oleh Pak Edy di *food court* Udayana Kuta. Pekerjaan ini merupakan sebuah profesi

kerja yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sehat secara fisik. Tugas Anto sebagai *cleaning service* biasanya membersihkan lingkungan *food court* Udayana Kuta. Pekerjaan sebagai *cleaning service* ini dilakukan oleh Anto karena tidak diterima bekerja di hotel yang ada di kawasan wisata Kuta.

Ketiga, operator CCTV. Penyandang disabilitas tunadaksa bernama I Wayan Nuartha menggunakan kursi roda dan sepeda motor yang dia desain khusus untuk menjalankan aktivitasnya setiap hari. Nuartha menderita cacat di kaki, sehingga operator CCTV merupakan pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan fisik. Aktivitas manusia yang teratur dan maksimal dapat diwujudkan melalui penciptaan ulang secara terus-menerus (Barker, 2005). Tugasnya setiap hari adalah memperhatikan CCTV di hotel untuk memantau aktivitas orang-orang demi menjaga keamanan hotel tersebut.

Keempat, penjual pulsa keliling. Pekerjaan Mas Nur yang memiliki kecacatan pada kakinya menjual pulsa hp keliling kawasan pantai Kuta. Pekerjaan ini terpaksa ditekuni setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Manusia akan hidup jika produktif dan mampu mengekspresikan kekuasaan manusiawi yang khusus (Priatna, 2003). Mas Nur memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris untuk menawarkan pulsa kepada wisatawan asing.

Pemberdayaan disabilitas menjadi penting karena kenyataan pada saat ini dengan meningkatnya kapitalisme industri dan pergeseran dari pertanian ke produksi berbasis pabrik, para pekerja baik itu pekerja norma atau pekerja disabilitas semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan standar kelincahan, gerakan tubuh yang ditentukan, kecepatan dan koordinasi (Chadha, 2005). Sementara itu pekerja dengan disabilitas kesulitan mengikuti perkembangan itu (Ontario Human Rights Commission, 2002), persyaratan ketat dari produksi pabrik menghalangi partisipasi banyak penyandang disabilitas di perkotaan (Chadha, 2005).

Dengan demikian penyandang disabilitas di Kabupaten Badung semakin meningkat

setiap tahunnya, namun kurang diberdayakan oleh pemerintah maupun pengusaha pada objek wisata Kuta. Penyandang disabilitas berjuang sendiri mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan pemerintah dan pengusaha belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas tersebut.

Simpulan

Penyandang disabilitas di Kabupaten Badung cukup banyak dan terus meningkat setiap tahunnya. Penyandang disabilitas kurang diberdayakan oleh pemerintah maupun pengusaha pada kawasan wisata Kuta. Penyandang disabilitas menjadi pengemis dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang disabilitas hanya sebagian yang mendapatkan pekerjaan pada objek wisata Kuta yaitu tunanetra dan tunadaksa. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung perlu mengkaji kembali peraturan terkait penyandang disabilitas. Pemerintah dan pengusaha diharapkan agar memberdayakan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta sesuai talenta dan keahlian mereka masing-masing.

Referensi

- Adioetomo, S. M., Daniel Mont, & Irwanto. (2016). *Penyandang disabilitas di Indonesia: Fakta empiris dan implikasi untuk kebijakan perlindungan sosial*. Jakarta. Diambil dari [http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang Disabilitas di Indonesia_Fakta Empiris untuk Kebijakan Perlindungan Sosial \(Bahasa Indonesia\).pdf](http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang_Disabilitas_di_Indonesia_Fakta_Empiris_untuk_Kebijakan_Perlindungan_Sosial_(Bahasa_Indonesia).pdf)
- Badungkab. (2015). Penyerahan bantuan 30 kursi roda dan 120 alat bantu dengar di Badung. Diambil 19 Mei 2019, dari <http://badungkab.go.id/baca-berita/904/Penyerahan-Bantuan-30-Kursi-Roda-dan-120-Alat-Bantu-Dengar-Di-Badung.html>
- Barker, C. (2005). *Cultural studies: teori dan praktik*. Yogyakarta: Bentang.
- Barker, C. (2014). *Kamus Kajian budaya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Exploring disability* (2 ed.). Cambridge: Polity Press.
- BPS Kabupaten Badung. (2015). *Analisis hasil SUPAS Kabupaten Badung Tahun 2015*. Badung.
- Budiana, D. (2017). *Upaya emansipasi kaum difabel melalui seni di Kabupaten Gianyar Bali*. Universitas Udayana.
- Chadha, E. (2005). Running on empty: The not so special status of paratransit services in Ontario. *Windsor Rev. Legal & Soc. Issues*, 20, 1.
- Dinas Sosial Kabupaten Badung. (2017). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Badung tahun 2017*. Bali.
- French, S., & Swain, J. (2012). *Working with disabled people in policy and practice : a social model*. Palgrave Macmillan. Diambil dari <http://nrl.northumbria.ac.uk/4008/>
- Halimah, L., & Anisah, A. (2018). Internalisasi nilai pendidikan kewarganegaraan pada tradisi pesta laut blanakan dalam rangka pengembangan ideal democratic citizen. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 148–160.
- Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). *Exceptional Learners: Introduction to special education* (10 ed.). Boston: Pearson.
- Iudici, A., Favaretto, G., & Turchi, G. P. (2019). Community perspective: How volunteers, professionals, families and the general population construct disability: Social, clinical and health implications. *Disability and Health Journal*, 12(2), 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2018.11.014>
- Kerlinger, F. N. (2006). *Asas-asas penelitian behavioral* (3 ed.). Yogyakarta: UGM Press.
- Kompas. (2016). Indonesia rebut medali pertama Paralimpik 2016. Diambil 18 Mei 2019, dari <https://olahraga.kompas.com/read/2016/>

- 09/09/17372061/indonesia.rebut.medali.pertama.paralimpik.2016
- Moleong, L. J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ontario Human Rights Commission. (2002). *Human rights and public transit services in Ontario: consultation report*. Toronto: Ontario Human Rights Commission.
- Pratiwi, I., & Hartosujono, H. (2018). Resiliensi pada penyandang tuna daksa non bawaan. *Jurnal Spirits*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.30738/spirits.v5i1.1057>
- Priatna, E. (2003). *Emansipasi intelektual menurut Jurgen Habermas*. Bandung: Katarsis.
- Putra, I. K. A. S., & Adhi, K. T. (2014). Status gizi penyandang cacat (tunagrahita dan tunarungu) di Sekolah Luar Biasa B Negeri Pembina Tingkat Nasional Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung. *Community Health*, II(1), 32–41. <https://doi.org/10.2105/AJPH.40.6.755-a>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metodologi penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suwardi, E. (2006). *Metode, teori, teknik penelitian kebudayaan: Ideologi, epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.